

INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN TERBUKA

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja tahun 2025



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja tahun 2025 pada hari kamis 21 Maret 2024 di ruang Rimbo Bujang Disnakertrans Prov Jateng Jl. Pahlawan no.16 Semarang secara Daring dan Luring. Tema pada forum perangkat Daerah ini adalah " Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Penguatan Daya Saing dan mendukung Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular ". Peserta Forum Perangkat Daerah berasal dari 35 Dinas Kab/Kota se-Jawa Tengah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketramsmigrasian, Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov Jateng, Perguruan Tinggi, APINDO, Kadin, Hillsi dan Organisasi - organisasi terkait lainnya. Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kadis Nakertrans Prov Jateng Ahmad Aziz, S.E., M.Si. dengan Narasumber dari DPRD Prov. Jateng.

Dialog dan Edukasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja



Semarang, 15 Maret 2024 - Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos menyelenggarakan Talkshow bersama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangkaian kegiatan "Dialog dan Edukasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja". Talkshow dibuka dengan Keynote speech oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, SE., M.Si dilanjutkan dengan Pembukaan dan Arahan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE., MM.. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong perusahaan agar secara tertib melaporkan kondisi penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan, mendapatkan update atas informasi mengenai jenis-jenis fasilitas kesejahteraan serta mendorong atau meningkatkan pelaksanaannya. Serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja, perlu ada acuan/pedoman dalam pelaksanaan fasilitas kesejahteraan yang mempunyai kekuatan hukum, bersifat tetap dan mengikat dalam bentuk peraturan sahnamanya amanat pasal 100 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Berkaitan hal tersebut, Komnaker RI saat ini tengah



YOGYAKARTA. Dalam rangka peningkatan kinerja bidang Kesejahteraan Rakyat, Disnakertrans. Prov. Jateng. bersama dengan Komisi E DPRD Prov. Jateng. dan Biro Kesejahteraan Rakyat - Setda. Prov. Jateng. melaksanakan Kunjungan Kerja bersama di BBPPMDPTT Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat. Fokus kunjungan diarahkan pada eksplorasi model pelatihan dan pengembangan masyarakat melalui pelatihan pemberdayaan Masyarakat. Pada kunjungan tersebut, dilaksanakan diskusi interaktif seputar strategi pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai instrumen pelatihan dan pembinaan tenaga kerja dan fasilitasi pelatihan pada BBPPMDPTT Yogyakarta.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2024



Boyolali - Menurut BPS, persentase kemiskinan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,13% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Dengan proporsi penduduk miskin ekstrem yang masih berada di angka 1,1% ditargetkan tuntas pada tahun 2024, maka dibutuhkan upaya percepatan penanganan dengan pendekatan multisektoral.

Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dipandang sebagai salah satu sektor yang menjadi pilar utama dalam rangkaian upaya tersebut. Oleh karena itu Disnakertrans. Prov. Jateng. menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

UMK Jateng 2024 Diumumkan, Kota Semarang Tertinggi



PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2024, Kamis (30/11/2023). Besaran UMK dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024.

Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan, UMK tertinggi Kota Semarang sebesar Rp3.243.969. Sementara UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp2.038.005,00.

Penjabat Gubernur Nana menuturkan, penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang



SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan nilai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp2.036.947. Nilai itu naik sekitar 4,02 persen dari UMP 2023 yang tercatat sebesar Rp1.958.169,69.